

# **PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi Empiris pada Perusahaan Energy yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)

**Alia Rahma Azzahra<sup>1</sup>, Dandes Rifa<sup>2</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email : [aliarahmaa88@gmail.com](mailto:aliarahmaa88@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penghindaran pajak adalah teknik yang dipakai untuk meminimalisir pembayaran pajak secara sah dan aman oleh wajib pajak, tanpa melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, komite audit dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* dengan karakteristik eksekutif sebagai variabel moderasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan *software* spss 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan komite audit dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karakteristik eksekutif memperkuat pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Karakteristik eksekutif memoderasi hubungan komisaris independen dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*, sedangkan karakteristik eksekutif tidak memoderasi hubungan komite audit terhadap *tax avoidance*

**Kata Kunci** : Komisaris independen, komite audit, koneksi politik, karakteristik eksekutif, *tax avoidance*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, pajak merupakan faktor penting dalam upaya mendukung anggaran penerimaan Negara [1]. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, pajak yaitu iuran wajib kepada negara oleh wajib pajak dan dana yang dibayarkan dari pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan nasional, seperti pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perpajakan dapat dikatakan sebagai salah satu kewajiban partisipasi langsung masyarakat dalam membantu pemerintah dalam memenuhi kerangka tanggung jawab Negara.

Berdasarkan kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan khususnya wajib pajak badan (2017-2021) masih jauh dari 100%. Banyak indikasi yang menyebabkan wajib pajak tidak menyampaikan SPT-nya, yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini terkait dengan kesengajaan wajib pajak dalam penyampaian SPT yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus penghindaran pajak di sektor pertambangan yang ada di Indonesia serta merugikan negara yakni kasus PT Adaro yang terjadi sejak tahun 2009-2017. PT Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International telah mengatur sedemikian rupa laporan keuangannya sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya di bayarkan di

Indonesia. PT Adaro melakukan praktik *transfer pricing* yang diartikan sebagai salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba yang tergolong pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) komisaris independen, komite audit, kualitas audit, karakteristik eksekutif, strategi bisnis, transfer pricing dan koneksi politik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh komisaris independen, komite audit [1] dan koneksi politik [2]; [3] dengan karakteristik eksekutif [1] sebagai variabel moderasi terhadap *tax avoidance*.

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori keagenan dan *theory of planned behavior*. Teori keagenan adalah konflik kepentingan antara pemegang saham (shareholders) selaku pemilik (prinsipal) yang kemudian mengontrak pihak manajemen sebagai agen guna melaksanakan manajemen sumber daya yang ada pada perusahaan. Korelasi antara pemegang saham dan manajer ketika konteks perencanaan pajak perusahaan dapat dipahami sebagai penerapan teori keagenan dalam mengejar strategi penghindaran pajak. *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa niat untuk berperilaku dapat menyebabkan individu berperilaku. Perilaku seseorang untuk melanggar peraturan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk melanggar peraturan perpajakan. Teori perilaku terencana merupakan teori yang tepat untuk menerangkan perilaku wajib pajak ketika melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

## METODE

Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022, dengan menggunakan metode *purposive sampling*, didapat sampel sebanyak 52 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Selain itu variabel yang digunakan pada penelitian ini terbagi atas tiga kelompok. Variabel pertama adalah variabel dependen yaitu *tax avoidance*, sedangkan variabel kedua yaitu variabel independen yang terdiri atas komisaris independen, komite audit

dan koneksi politik. Variabel ketiga adalah variabel moderasi yaitu karakteristik eksekutif.

Dalam membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan pada penelitian ini maka metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan alat bantu *software spss 25*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	B	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,653	0,000	
Komisaris Independen	-0,144	0,011	Diterima
Komite Audit	-0,061	0,485	Ditolak
Koneksi Politik	0,06	0,212	Ditolak
Karakteristik Eksekutif	-0,084	0,051*	Diterima
X <sub>1</sub> *Z	0,038	0,047	Diterima
X <sub>2</sub> *Z	0,069	0,755	Ditolak
X <sub>3</sub> *Z	-0,125	0,025	Diterima
R - Square	:	0,150	
F - Statistic	:	0,021	

Keterangan : \* Signifikan pada  $\alpha = 0,10(10\%)$

Dari tabel 1 diatas dapat kita lihat bahwa nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,150, hal ini berarti variabel-variabel independen serta variabel moderasi mampu menjelaskan kontribusinya dalam mempengaruhi *tax avoidance* adalah 15, sedangkan 85% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Sesuai hasil pengolahan data pada tabel 1 terlihat bahwa uji F sebesar 2,996 dan signifikan 0,021 < 0,05, sehingga metode regresi yang digunakan sudah layak, sehingga dinyatakan bahwa semua variabel independen serta variabel moderasi mempengaruhi variabel dependen secara simultan dan signifikan.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi proporsi komisaris independen

dalam suatu perusahaan dapat berdampak pada penurunan penghindaran pajak perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tren perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara agresif tidak ditentukan oleh jumlah komite audit, tetapi lebih bergantung pada kualitas dan kemandirian komite audit tersebut dalam menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. hubungan politik tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak, karena semakin besar koneksi politik yang dimiliki perusahaan semakin kecil perusahaan memanfaatkan koneksi politik tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki risiko perusahaan tinggi atau eksekutifnya risk taker cenderung menyajikan laporan keuangan lebih apa adanya untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan sehingga peluang untuk melakukan *tax avoidance* menjadi rendah.

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif mampu memoderasi hubungan antara komisaris independen dengan *tax avoidance*. Hipotesis keenam menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif tidak mampu memoderasi hubungan antara komite audit dengan *tax avoidance*. Hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif mampu memoderasi hubungan koneksi politik dengan *tax avoidance*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, komite audit dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karakteristik eksekutif mampu memoderasi

hubungan antara komisaris independen dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*, dan karakteristik eksekutif tidak mampu memoderasi hubungan antara komite audit dengan *tax avoidance*.

Saran pada penelitian ini untuk penelitian selanjutnya. Pertama, diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan tahun amatan yang lebih panjang. Kedua, menyesuaikan pengukuran *tax avoidance* dengan variabel independennya terhadap penelitian selanjutnya. Ketiga, menambahkan variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, seperti strategi bisnis, pengendalian internal, *transfer pricing*, ketidakpastian lingkungan, dan *capital intensity*.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. I. Sahara, “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Sci. J. Reflect. Econ. Accounting, Manag. Bus.*, vol. 5, no. 3, pp. 507–515, 2022, doi: 10.37481/sjr.v5i3.503.
- [2] A. Eksandy, “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014),” *Compet. J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 1, no. 1, p. 1, 2017, doi: 10.31000/competitive.v1i1.96.
- [3] A. D. Nurrahmi and S. Rahayu, “Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia),” *J. Akunt. Ekon. FE. UN PGRI Kediri*, Vol. 5, No. 2, Pp. 48–57, 2020, [Online]. Available: [Www.Idx.Co.Id](http://Www.Idx.Co.Id).